**ABSTRAK**

Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tetapi dewasa ini para pelaku usaha banyak tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan usaha yang dimiliki legal atau ilegal yang belum memiliki perizinan yang berwira usaha dilingkungan masyarakat yang tidak sedikit mengganggu suasana dijalan dan berdampak pada kondisi kesejahteraan masyarakat yang berada dilingkungan usaha tersebut.

 Pengamatan ini berjudul **“Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan”.** Pengamatan ini bertujuan untuk mendiskripsikan kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sebagai upaya penertiban badan usaha investor dan penanaman modal yang legal dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku, mengidentifikasikan faktor-faktor penghambat, dan mengetahui upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas dalam menghadapi faktor penghambat tersebut. Metode yang digunakan dalam pengamatan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif, untuk menggambarkan proses pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

 Berdasarkan pengamatan dan pengolahan data, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Musi Rawas masih belum optimal namun sudah cukup baik ini dibuktikan dengan banyaknya pelaku usaha dan badan usaha yang belum memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang ditemukan pada saat operasi keliling langsung kelapangan tempat usaha yang dilakukan oleh pegawai Dinas Penanman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

 Saran terbaik yang penulis dapat sampaikan adalah dengan mengoptimalkan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas dan Dinas terkait. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan hal yang penting dalam mengoptimalisasikan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu karena berhubungan langsung dengan kualitas kerja (kinerja), profesionalisme, dan pelayanan prima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kualitas tersebut yang akan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat.

Kata Kunci : Peranan, Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

.

**ABSTRACT**

Trading License, hereinafter referred to as SIUP, is a License to be able to conduct trading business activities. Any company, cooperative, partnership or individual company, conducting business of trading activity shall obtain SIUP issued based on company domicile and valid in all territory of Republic of Indonesia . But nowadays many business actors do not have Trading Business License (SIUP) and businesses owned by legal or illegal who do not have licensing business entrepreneurship that do not disturb the atmosphere of the street and impact on the welfare condition of the people who are in the business environment.

This observation is entitled "**The Role of One Stop Service and One Stop Service (DPMPTSP) of Musi Rawas Regency of South Sumatera Province**". This observation is aimed to describe the implementation of one-stop service as an effort to curb investor's business entity and legal investment by referring to the prevailing regulations, to identify inhibiting factors, and to know the effort of One Stop Service and One Stop Service Service (DPMPTSP) ) Of Musi Rawas Regency in facing the inhibiting factors. The method used in this observation is descriptive method with inductive approach, to describe the process of implementation of one-stop integrated service.

Based on observation and data processing, the authors conclude that the implementation of one-door integrated services in Musi Rawas Regency is still not optimal but it is good enough is evidenced by the number of business actors and business entities that do not have a Trade Business License (SIUP) found at the time of operation around direct spaciousness of the place of business undertaken by employees of the Office of Penanman Capital and One Stop Service (DPMPTSP).

The best suggestion that the author can convey is by optimizing the coordination and supervision made by the One Stop Door (DPMPTSP) Service Office of Musi Rawas Regency and related Office. Improving the quality of human resources can also be done. Improving the quality of Human Resources is important in optimizing the implementation of one-stop integrated services because it directly relates to the quality of work (performance), professionalism, and excellent service by the One Stop Service and One Stop Service (DPMPTSP). These qualities will affect the level of community satisfaction.

Keywords: Role, One Stop Integrated Service Implementation